

MENGUATKAN INDONESIA: REVITALISASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KARAKTER

Ani Cahyadi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin
anichahyadi@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan beberapa isu yang terkait dengan pendidikan karakter di Indonesia, mulai dari aspek konsep dan nilai-nilai Islam dalam pendidikan karakter hingga pola pembelajaran yang akan diterapkan. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa Pancasila yang merupakan core values dalam pembentukan Negara-bangsa Indonesia dapat dijadikan sebagai referensi dalam menyusun pola pendidikan dimaksud serta sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Dengan menggunakan pendekatan analisis-elaboratif, tulisan ini menawarkan sejumlah konsep awal yang dapat digunakan untuk merevitalisasi Pancasila dan Pendidikan Agama melalui kerangka yang berbasis multi-dimensional.

Kata Kunci : *Islam; Nilai-nilai Islam; Pendidikan Karakter*

Abstract

REVITALIZATION OF CHARACTER EDUCATION LEARNING: This article discusses some of the issues related to character education in Indonesia, ranging from the concepts and Islamic values related to character education to learning patterns that will be applied. This work concludes that Pancasila which becomes the core values in the formation of the Indonesian nation-state can be used as a reference in preparing the character education learning program and it, by no mean, conflicts with

Islamic values. By using elaborative-analysis approach, this study offers a number of initial concepts that can be used to revitalize Pancasila and Religious Education through a multi-dimensional-based framework.

Keywords : *Islam; Islamic Views; Character Education*

A. Pendahuluan

Dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan Indonesia secara orisinil bertumpu pada pembangunan jiwa, nilai dan kewarnganegaraan, sembari terus meningkatkan ketajaman dalam hal membaca, menulis dan menyimpulkan. Namun harus diakui bahwa seiring pertengahan abad ke-20, banyak sekolah yang “melepaskan diri” dari fungsi tradisionalnya sebagai pendidik karakter. Inilah yang lalu menghasilkan “musibah konsekuensi bagi masyarakat dan kaum muda”.

Sejarah terjadinya pergeseran itu secara lengkap tampaknya masih ditulis, namun yang jelas relatif sedikit yang tidak setuju bahwa adanya defisiensi, perilaku kaum muda yang agak destruktif dan menyiakan potensi mereka merupakan fakta dan akan menghancurkan masa depan (kebahagiaan) mereka dan masyarakat. Ketika pendulum pendidikan karakter ini kembali, banyak diskursus baru yang muncul. Lembaga pendidikan, orang tua, dan komunitas tertentu, berjibaku dengan pentingnya gugusan nilai-nilai seperti, kebangsaan, respek, bekerja keras, dan integritas serta hubungan nilai-nilai itu dalam menentukan kesuksesan hidup dan meningkatkan kapasitas kebangsaan.

Merosotnya nilai dan norma yang diindikasikan oleh masih banyaknya angka kriminalitas dan sejenisnya membuat banyak pakar kembali merumuskan bentuk pendidikan seperti apa yang dinilai efektif dalam memotong secara signifikan angka-angka patologi sosial tersebut. Di antara bentuk pendidikan yang ditawarkan adalah pendidikan karakter. Meskipun istilah ini cukup terkenal, namun oleh sementara pakar, pendidikan karakter masih dianggap memiliki sejarah yang tidak terlalu jelas.

Meskipun banyak penelitian kasus terkait pendidikan karakter yang menunjukkan keuntungan pendidikan karakter menyeluruh, namun para praktisi dan ilmuwan harus menghadapi

kenyataan bahwa bersamaan dengan itu bukti-bukti penelitian terkadang tidak bersifat universal dan positif secara konsisten. Beberapa penelitian yang bernada positif misalnya ditemukan oleh Berkowitz dan Bier (2005) yang menguji lebih dari 100 studi dan mengidentifikasi 54 program pendidikan karakter yang diakui reputasinya. Dalam penelitian ini, dibuat scoring desain-desain penelitian.¹Berdasarkan penelitian ini juga, pada tahun 2008, Berkowitz dan beberapa yang lain menyimpulkan bahwa (a) pendidikan karakter dapat mempromosikan pembangunan karakter dengan bukti-bukti signifikan terkait dengan efektifitasnya; (b) pendidikan karakter berdampak secara positif terhadap pencapaian akademik; dan (c) pendidikan karakter memiliki dampak besar terhadap berbagai hasil psiko-sosial, termasuk perilaku seks, kemampuan *problem-solving*, hubungan sosial dan keterikatan dengan sekolah.²

Marshall, Caldwell, dan Foster menemukan dua hal yang secara signifikan positif. Yang pertama bahwa pendidikan karakter terpadu dihasilkan pada lingkungan sekolah yang baik, meningkatkan perilaku moral dan pro-sosial siswa serta skor membaca dan tes matematika. Selain itu, didapatkan bahwa sekolah terkait akan lebih perhatian pada masyarakat, pelanggaran disiplin terutama terkait dengan praktik bullying dan skor ujian meningkat hingga 50 persen.³Durlak dan kawan-kawan juga melakukan meta-analysis pada 213 program pembelajaran berbasis sosial-emosional yang melibatkan 270.000 orang siswa. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa dibandingkan dengan control groups, pembelajaran berbasis sosial-emosional menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada skill sosial dan emosional, perilaku, pendekatan dan performa akademik.⁴

¹ Berkowitz, M. & Bier, M., *What Works in Character Education: A Research-Driven Guide for Educators* (Washington, D.C.: Character Education Partnership, 2005).

² M. Berkowitz, Battistich, V. & Bier, M. "What works in character education: What is known and what needs to be known." dalam L. Nucci and D. Narvaez (Eds.), *Handbook of Moral and Character Education* (New York: Routledge, 2008), h. 414-431.

³ J. Marshall, S. Caldwell & J. Foster, "Moral Education the CHARACTERplus way", dalam *Journal of Moral Education*, 40 (2011), h. 51-72.

⁴ J. Durlak, et al., "the Impact of Enhancing Students Social and

Meskipun demikian, ada juga sementara penelitian yang justru tidak menemukan adanya pengaruh signifikan program-program berbasis pendidikan karakter. Sebagai contoh pada tahun 2010 lalu, Departemen Pendidikan Amerika Serikat (U.S. Department of Education) mensponsori sebuah penelitian yang menguji tujuh program terpisah terkait pengembangan karakter dan sosial yang melibatkan siswa kelas tiga hingga kelas lima selama tiga tahun. Hasilnya secara rata-rata menunjukkan bahwa program itu tidak meningkatkan kompetensi sosial-emosional, perilaku dan pencapaian akademik siswa serta tidak meningkatkan persepsi siswa-guru terhadap suasana sekolah.⁵

Di Amerika Serikat misalnya, pendidikan karakter dimasukkan dalam program Departemen Pendidikan US yang bertajuk “*What Works Clearinghouse*” (WWC). Untuk bisa masuk program ini, program sekolah berbasis pendidikan karakter mesti lolos protokol yang cukup ketat. Karena ketatnya uji ini, hanya sedikit program pendidikan karakter yang dinyatakan lolos.

Sementara di Indonesia sendiri, tampaknya belum ada program kanalisasi yang dapat membina secara khusus program-program pendidikan karakter. Paling tidak di subyek yang dijadikan instrumen dalam pendidikan karakter ada dua: pendidikan agama dan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Kemdikbud sebagai lembaga pemerintah yang menangani dan bertanggungjawab terhadap upaya mencerdaskan bangsa, hanya terlihat melakukan paling tidak dua program utama terkait pendidikan karakter, yaitu program kampanye dan sosialisasi pendidikan karakter. Yang kedua, adalah upaya integrasi pendidikan karakter dalam program pembelajaran yang utamanya dilakukan melalui pelajaran agama. Namun banyak juga yang menilai bahwa porsi pendidikan agama masih relatif sedikit.

Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions” *Child Development*, 82 (2011), h, 405-432.

⁵ U.S. Department of Education, *Efficacy of Schoolwide Programs to Promote Social and Character Development and Reduce Problem Behavior in Elementary School Children* (NCER: Institute of Education Sciences, 2010), h. iii.

Meski menghasilkan beberapa pencapaian, usaha dan upaya pemerintah dalam menguatkan karakter masyarakat Indonesia dianggap masih belum begitu efektif. Pemerintah seringkali berdalih bahwa pendidikan karakter tidak bisa sepenuhnya menjadi domain pemerintah.

Terlepas dari perdebatan ini, yang jelas terlihat adalah tidak banyak yang menolak peran pendidikan agama dan Pancasila adalah penting dalam pembentukan karakter. Namun tentu saja, bukan hanya pendidikan karakter secara formal, namun juga faktor lingkungan keluarga sebagai sekolah pertama yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan karakter seseorang. Di samping itu, beberapa kasus yang menunjukkan “kegagalan” pembelajaran pendidikan karakter mesti dievaluasi melalui kerangka yang reliabel.

Maka diperlukan tidak hanya reformulasi pendidikan karakter seperti apa yang diperlukan oleh masyarakat kita, juga perlu digali kerangka pendekatan seperti apa yang diperlukan. Jangan sampai pendidikan karakter dianggap sebagai bisnis yang rumit.⁶ Tidak hanya rumit, bisa jadi silabus dan implementasinya banyak menyimpan kontradiksi. Ini perlu diketahui oleh para pemegang kebijakan.

Kekhawatiran lainnya adalah pendidikan karakter hanya diarahkan untuk fokus pada kegiatan menghafal nilai-nilai. Dengan kata lain, perlu ditekankan bahwa pendidikan karakter tidak diarahkan sekadar obat dari krisis di masyarakat. Justru tujuan pokok dari pendidikan karakter adalah untuk membangun karakter bertanggungjawab dan masyarakat sipil yang demokratis.⁷

Dengan demikian, reformulasi pendidikan karakter berbasis konteks menjadi sangat penting dan boleh dianggap menjadi kebutuhan mendesak. Pertanyaannya tentu saja: selanjutnya

⁶ Kupperman, J. J. “How not to educate character” dalam Lapsley, D.K. & Power, F.C. (ed). *Character psychology and character education*. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2005), h. 201–217.

⁷ Abdul Rahman Md. Aroff, “Character building and education”, dalam Chang Lee Hoon, Norani Mohd Salleh, Wan Hasmah Wan Mamat & Vishalatche Balakrishnan (eds), *Asia Pacific Moral, Civic and Citizenship Education: New Vision and New Realities* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2008), h. 7.

pendidikan karakter seperti apa yang ingin dibentuk pada generasi kita?

Bila melihat pengalaman Malaysia, misalnya, dalam menyelenggarakan pendidikan karakter kita akan menemukan beberapa fakta menarik. *Yang pertama*, dalam praktiknya kalangan muslim dan non-muslim menerima subyek pelajaran “yang berbeda” penamaannya. Bila non-muslim diajarkan pendidikan moral (moral education), maka kalangan muslim diajarkan pendidikan Islam (Islamic Education). *Yang kedua*, terjadi revisi silabus pendidikan moral di Malaysia pada tahun 2000. Salah satu alasannya adalah kesulitan yang dihadapi oleh guru yang mengajarkan subyek pendidikan moral. Titik kesulitan itu pada pembelajaran nilai-nilai yang sama namun tanpa adanya spesifikasi terhadap isu dan situasi yang berbeda pada seluruh level sekolah. Di samping itu, revisi silabus pendidikan moral juga ditengarai terlalu banyaknya nilai yang diajarkan (80 nilai: terdiri dari 16 nilai pokok dan 64 sub-nilai untuk sekolah lanjutan) yang mesti terpenuhi dalam satu tahun. Alasan terbesar dari adanya revisi silabus adalah untuk mengaitkan isi silabus itu dengan isu-isu yang lebih besar dan kritis, sebagaimana juga isi silabus diharapkan menjadi tandem bagi kebijakan nasional serta filosofi pendidikan nasional.⁸

Pengalaman Malaysia di atas, tampaknya dapat dijadikan refleksi penting untuk menguatkan kembali karakter nasional Indonesia. Pada kesempatan yang sama, hal itu turut mengafirmasi bahwa pendidikan agama dan pendidikan pancasila-kewarganegaraan tampaknya perlu direvitalisasi agar menghasilkan output yang lebih efektif.

Maka ketika berbicara terkait dengan revitalisasi pembelajaran pendidikan karakter di Indonesia, mau tidak mau kita dihadapkan kepada beberapa pendekatan. Beberapa pendekatan ini sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1960an. Sekadar menyebut, beberapa pendekatan itu di antaranya

⁸Lihat misalnya: Chang Lee Hoon, “An Appraisal on the Implementation of Moral Education for Schools in Malaysia”, dalam *Proceedings of the 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI*, Bandung 8-10 November 2010, h. 3-6; V. Balakrishnan, *Real-Life Dilemmas in Moral Education* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2011).

pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification*),⁹ pendekatan analisis nilai (*value analysis approach*),¹⁰ pendekatan keadilan komunitas (*just community approach*),¹¹ pendekatan kepedulian (*caring approach*),¹² pendekatan pendidikan karakter,¹³ pendekatan berbasis skil dalam pendidikan moral,¹⁴ dan pendidikan karakter dengan pendekatan teliti dan berbasis sains.¹⁵

Bahwa setiap pendekatan memiliki kekurangan dan kelebihan adalah niscaya. Yang terpenting, tentu saja, bagaimana kemampuan guru atau pendidik untuk dapat lebih eklektis dan lebih mampu membuat keputusan profesional, mengintegrasikan berbagai pendekatan ini dalam konteks proses pembelajaran moral di sekolah. Chang menegaskan kembali bahwa guru merupakan orang yang dianggap sebagai kunci dari implementasi kurikulum karena mereka yang akan menerjemahkannya, memotivasi, dan menyediakan kesempatan bagi pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik atau guru pemangku pendidikan karakter tidak hanya dituntut untuk menguasai *subject matter*, tapi harus lebih familiar dengan pengetahuan pedagogik yang relevan dengan kebutuhan harian peserta didik.¹⁶

⁹ L.E. Raths, M. Harmin & S.B. Simon, *Values and Teaching* (Ohio: Charles E., Merrill Publishing Co., 1966).

¹⁰ Hersh, Miller & Fielding, *Models of Moral Education: An Appraisal* (New York: Longman Inc, 1980).

¹¹ A. Higgins, "the Just Community Approach to Moral Education: Evolution of the Idea and Recent Findings" dalam W. M. Kurtiner & J.L. Gerirtz (Ed). *Handbook of Moral Behaviour and Research*, vol. 3 (New Jersey: Lawrence Erlbaum, 1991).

¹² N. Noddings, *Caring. A Feminine Approach to Ethics and Moral Education* (Berkeley: University of California, 1994).

¹³ T. Lickona, "Educating for Character: A Comprehensive Approach" dalam A Molnar (Ed). *The Constuction of Children's Character, Ninety-sixth Yearbook of the National Soceity for the Study of Education*, part II (Chicago: the University of Chicago, 1997).

¹⁴ D. Narvaez, *Nurturing Character in the Middle School Community. Community Voices and Character Education Project* (Minnesota: Families and Learning & University of Minnestotta, 2000).

¹⁵ Aynur Pala, "The Need for Character Education", *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*, vol. 3 No. 2 (2011), h. 23-31.

¹⁶ Chang Lee Hoon, "An Appraisal on the Implementation of Moral Education for Schools in Malaysia", dalam *Proceedings of the 4th International*

Secara fundamental, paling tidak dikatakan ada lima kunci sukses dalam pendidikan karakter, yaitu (1) instruksi mesti disusun dengan matang; (2) adanya aplikasi dari materi pengajaran; (3) komponen dari program mestinya *teacher friendly*. Artinya program mudah diterima oleh guru dan diajarkan secara efektif; (4) didukung oleh banyak semua pihak terkait di sekolah; (5) persiapan siswa agar kondisi sekolah menjadi kondusif.¹⁷

B. Nilai Islam

Ada beberapa penelitian terkait dengan kontribusi nilai-nilai Islam dalam membentuk karakter bangsa. Di antaranya, Jakaria Ma'zumi yang menyimpulkan bahwa nilai-nilai pembelajaran karakter pada madrasah dapat menyediakan kontribusi positif dan signifikan terhadap pembangunan karakter bangsa.¹⁸ Patricia Zahirah Salahuddin pernah melakukan penelitian dengan metodologi kualitatif kasus tunggal (*a qualitative single-case*) terkait studi kasus kurikulum pada sebuah sekolah dan menemukan lima hal: (1) pendidikan karekter didefinisikan oleh para mereka yang terlibat dengan melihat faktor genetik, proses dan prilaku yang diharapkan, (2) penyampaian pendidikan karakter dilakukan melalui divisi tertentu, namun masih ditemukan adanya integrasi parsial pendidikan karakter dalam pembelajaran inti (*core courses*), (3) Sebelas Prinsip CEP (*Character Education Partnership*) tidak sepenuhnya dilaksanakan dalam inisiasi pihak sekolah.¹⁹

Selain itu, juga ada penelitian yang dilakukan oleh Heru Nugroho yang menyimpulkan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai Islam dilakukan tiga fundamen: (1) melalui ajakan,

Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI, Bandung 8-10 November 2010, h. 3-6

¹⁷ Aynur Pala, "The Need for Character Education", dalam *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*, vol. 3 No. 2 (2011), h. 27.

¹⁸ Jakaria Ma'zumi, "Contribution of Madrasah to the Development of the Nation Character", *International Journal of Scientific & Technology Research*, vol. 1, 11 (2012), h. 37-39.

¹⁹ Patricia Z. Salahuddin, "Character Education in a Muslim School: A Case Study of a Comprehensive Muslim School's Curricula", *Disertasi doctoral* tidak diterbitkan di Florida International University Miami Florida (2011).

pembiasaan, proses penyadaran emosi, dan proses penegakan aturan; (2) perlu peran aktif guru dalam menyampaikan arahan, nasehat dan petunjuk sesuai nilai-nilai Islam, dan (3) melibatkan orang tua dan masyarakat, misalnya melalui program yang disepakati untuk dijalankan bersama.²⁰

Namun pada umumnya temuan penelitian di atas sangat kontekstual sehingga tidak dapat dijadikan kesimpulan yang bersifat generalisasi, apalagi untuk kemudian disepakati sebagai pedoman pendidikan karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, cukup sulit untuk membuat rumusan nilai-nilai yang dapat diterima kemudian diterjemahkan dalam program riil dan terukur.

Dari pemaparan di atas, tampak bahwa memang diperlukan kerja bersama (*work together*) dari seluruh pihak terkait dalam komunitas sekolah untuk dapat merumuskan definisi pendidikan karakter yang dibenamkan pada proses bersama dan perilaku yang diharapkan.

C. Konteks Indonesia

Berdasarkan adanya kerja bersama dan semacam kesepakatan itulah, tidak pelak lagi bahwa Indonesia tidak perlu repot untuk merumuskan kembali nilai-nilai pendidikan karakter. Alih-alih mencari rumusan baru, Pancasila telah menempati posisi yang sangat strategis dalam formulasi nilai pendidikan karakter baik secara historis atau kultur-sosial-agama di Indonesia. Dengan adanya landasan karakter kebangsaan yang telah disepakati oleh *founding fathers* ini, sesungguhnya tidak terlalu relevan lagi untuk menggali terlalu dalam nilai-nilai dalam pembelajaran karakter dalam konteks Indonesia.

Pendiri Indonesia menyadari bahwa “pembelajaran karakter” adalah lokus esensial untuk mencapai kesuksesan masyarakat yang demokratis. Pasalnya, demokrasi yang sehat memerlukan adanya kebaikan-kebaikan sipil seperti kesadaran akan hukum, menghormati hak orang lain, perhatian pada

²⁰ Heru Nugroho, “Pengelolaan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Islam di SD Islam al-Azhar 28 Solo Baru Sukoharjo”, *Tesis S-2* tidak diterbitkan pada Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (2012).

perbuatan baik dan partisipasi dalam dalam kehidupan publik. Pada sekitar tahun 1950-an, di sekolah-sekolah dasar (sekolah rakyat) di Indonesia diajarkan pendidikan agama dan pendidikan tatanegara. Para guru berpegang teguh dengan kedisipinan, teladan, dan kurikulum akademik untuk menginstruksi peserta didik dalam mempriaktikkan nilai-nilai patriotisme, kerja keras, sopan santun, hemat, kedermawanan, dan ketegaran. Peserta didik muslim dididik untuk menginternalisasi makna-makna *Surah al-Fatihah*. Nilai-nilai untuk menjadi warga Negara yang baik diajarkan dalam subyek tata Negara. Seperti yang dikatakan oleh Lickona, bahwa pendidikan karakter itu seusia dengan pendidikan itu sendiri. Tengoklah sejarah, di belahan dunia manapun, pendidikan memiliki dua tujuan besar: membantu anak muda agar cerdas, dan untuk membantu mereka menjadi orang baik.²¹

Namun harus diakui bahwa beberapa dasawarsa setelah itu, keyakinan pada pendidikan karakter mulai menyusut. Adanya tren sosial tertentu ikut berkontribusi pada reduksi pendidikan karakter di sekolah, termasuk adanya gelombang peserta didik dengan latar belakang etnis yang berbeda, disrupsi kultural yang menggiring pada resistensi otoritas dan persepsi adanya indoktrinasi karakter, serta tumbuhnya daerah-daerah urban dan mobilitas sosial.

Kekisruhan dan perubahan sosial itu ikut dibawa pada sekitar akhir tahun 1940 hingga 1970-an oleh perubahan global berupa perang-berakhirnya perang, munculnya era hak sipil, revolusi teknologi, kultur sosial, dan gerakan feminis. Meski tidak sama sekali hilang, pendidikan karakter saat itu dinilai cenderung berorientasi pada penekanan nilai-nilai individual. Usaha pendidikan nilai lebih fokus pada membantu peserta didik untuk data mengklarifikasi nilai-nilai personal mereka, ketimbang mengajarkan moralitas dan etika. Meskipun di sisi yang lain, pendidikan karakter melalui subjek agama diyakini masih memberi peluang reduksi itu tidak semakin dalam, namun tetap saja pada tataran sejarah, budaya kita saat ini cenderung lebih alot dengan kepentingan pribadi ketimbang generasi-generasi lama. Realitas ini turut ditangkap Weissbourd dengan ungkapan “tidak ada keseimbangan antara tanggungjawab

²¹ T. Lickona, *Educating for Character: How Our Schools can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam, 1991), h. 6.

terhadap masyarakat dan keinginan diri untuk meningkat”.²²

Usaha pendidikan karakter tampaknya mendapati momentumnya lagi melalui adanya globalisasi informasi dan perkembangan tren pendidikan. Ini setidaknya terjadi sekitar awal 1990-an, ketika ada advokasi khusus yang menegaskan kembali bahwa pendidikan karakter merupakan instrumen penting dalam membangun kesadaran nasional sebuah bangsa.

Perkembangan ini selain menunjukkan bahwa sesungguhnya Indonesia telah lebih dahulu merumuskan advokasi karakter dalam level nasional (*national-level character advocacy*), juga mengisyaratkan perlunya revitalisasi Pancasila sebagai warisan *core values* secara nasional.

Secara elaboratif, Pancasila sebenarnya telah mewakili nilai-nilai Islam yang dianggap dapat membawa Indonesia menjadi negara-bangsa yang raya dan berdikari. Sila pertama, “Ketuhanan yang Maha Esa” sesungguhnya menunjukkan pentingnya Tauhid dalam kehidupan. Dalam perspektif pendidikan, Tauhid yang merupakan hubungan dengan Allah Sang Pencipta, adalah area prioritas bagi hamba untuk lebih mengenal-Nya, percaya diri dengan keesaan Allah dan mestinya lahir dan dibentuk pada awal pendidikan generasi.²³

Sementara kemanusiaan yang adil dan beradab adalah legacy kedua yang dititipkan oleh pendiri bangsa ini. Melalui kemanusiaan, masyarakat dituntut untuk dapat menerapkan Golden Rule: *bahwa sebagaimana kita ingin diperlakukan, seperti itulah kita memperlakukan orang lain*. Bila ditelisik lebih dalam, sesungguhnya ini sangat relevan dengan ajaran profetik yaitu sebuah hadis yang berbunyi:

“Seseorang tidak beriman secara sempurna sampai dia dapat mencintai sesuatu yang menyimpannya juga didapat oleh saudaranya”.²⁴

²² R. Weissbourd, *the Parents We Mean to be: How Well Intentioned Adults Undermine Children's Moral and Emotional Development* (Ney York: Houghton Mifflin, 2009), h. 176.

²³ M. Natsir, *Percakapan antara Generasi: Pesan Perjuangan Seorang Bapak* (Malaysia: Dewan Pustaka Islam, 1975).

²⁴ Muttafaq ‘alayh. Lihat: Ibn Hanbal, *Musnad Ibn H{anbal*, No. 13462;

Sementara yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa persatuan hati dalam satu visi kebaikan bersama merupakan cita-cita luhur. Indonesia yang divisikan menjadi merdeka dan raya, diproyeksikan bersatu padu agar dapat mencapai kesuksesan tersebut (lihat misalnya: QS. Ali 'Imran: 105; QS. al-Anfal: 46, 62; QS. al-An'am: 159).

Sila yang keempat dari Pancasila adalah berbicara tentang asas dan prinsip dalam penyelenggaraan Negara. Bunyi sila ini adalah "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Imam asy-Syafi'i membuat satu bab dalam monograf monumentalnya, *al-Umm* yang berjudul Bab al-Musyawah. Di dalamnya, dia meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah orang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya. Oleh karena itu, menurut al-Syafii, musyawarah mesti dilakukan oleh pemimpin kepada orang yang alim sekaligus amin.²⁵ Dalam bahasa Pancasila, inilah yang disebut prinsip hikmat kebijaksanaan. Hikmat adalah kecerdasan ilmu sementara kebijaksanaan adalah integritas.

Adapun sila yang kelima yaitu terkait dengan visi keadilan yang dapat dirasakan seluruh rakyat, tanpa melihat latar belakangnya. Sila ini berbunyi: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila diperhatikan dalam al-Quran, paling tidak disebut 20 kali ayat yang menyebut tentang keadilan. Dalam al-Quran, juga terdapat empat jenis kata yang masing-masing bermakna keadilan yaitu: *al-'adl*; *al-qist*, *al-wasaf*, dan *al-mizān*. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam terminologi al-Quran diekspresikan dalam berbagai kata. Banyaknya ekspresi ini menunjukkan betapa pentingnya substansi kata tersebut, "*kaṣratul al-asmā' yadullu 'ala syaraf al-musammā'*".

Dengan demikian, Pancasila bukan hanya tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, namun juga sangat

Abū al-Qāsim ibn Bisyrān, *Amāli Ibn Bisyrān*, No. 39; Ismā'il ibn al-Qāsim al-Ḥalabi, *Ḥadīṣ Abī al-Qāsim al-Ḥalabi*, No. 14.

²⁵ Muḥammad ibn Idrīs asy-Syafii, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990).

relevan dengan Islam itu sendiri. Dengan bahasa sederhana: Pancasila itu sangat islami.

D. Penekanan *Multi-Initiatives*

Pembelajaran nilai-nilai pancasila perlu dikerangkakan dalam batas-batas yang jelas. Pancasila sejatinya mesti diterjemahkan dalam kerangka kerja pendidikan karakter modern.

Dengan menggunakan kerangka Lickona et al,²⁶ Berkowitz & Bier,²⁷ Ryan & Bohlin,²⁸ yang dapat diturunkan dalam sebelas prinsip dalam pembelajaran karakter, maka secara ringkas pembelajaran pendidikan karakter untuk pembangunan Indonesia, mestinya: (1) pancasila dijadikan *core ethical values*, sebagai landasan karakter yang baik; (2) karakter perlu didefinisikan secara komprehensif agar dapat mencakup berfikir, merasa, dan bertindak; (3) pendekatan yang digunakan bersifat komprehensif, intensional dan proaktif; (4) perlu dibuat komunitas yang peduli dengan pendidikan karakter; (5) menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan aksi moral; (6) memasukkan suasana akademik yang bermakna dan menantang; (7) berusaha menggali motivasi diri pribadi pada peserta didik; (8) mengikat staf sekolah sebagai komunitas pembelajar dan moral yang diharapkan dapat saling berbagi terkait tanggungjawab terhadap pendidikan karakter; (9) menjaga kepemimpinan yang berbagi moral dan dukungan tanpa batas untuk inisiatif-inisiatif pendidikan karakter; (10) perlunya peran keluarga dan masyarakat yang diikat sebagai partner dalam upaya pembangunan karakter; (11) melakukan evaluasi karakter sekolah, penyelenggara, dan peserta didik.

Selain adanya penyelenggaraan pendidikan karakter yang diadopsi dalam *setting* di atas, juga diperlukan pemimpin

²⁶ T. Lickona dan M. Davidson, "Smart and Good: Integrating Performance Character and Moral Character in Schools", dalam *Independent School*, 66, 2 (2007), h. 24-28.

²⁷ M. W. Berkowitz & M. C. Bier, "Research-based Character Education", dalam *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 591 (2004), h. 72-85.

²⁸ K. Ryan & K. Bohlin, *Building Character in Schools: Practical Ways to Bring Moral Instruction to Life* (CA: Jossey-Bass, 1999).

sekolah—yang tidak kenal lelah untuk memastikan bahwa inovasi dianut dan dilaksanakan. Banyak waktu, energi dan dan yang diinvestasikan untuk mengenalkan dan melatih pendidikan karakter ini secara detil di fakultas dan pada kalangan staf pengajar.²⁹

Semua itu menunjukkan bahwa diperlukan adanya inisiasi reformis yang mencakup pembangunan komunitas-sekolah, sisi didaktis, pengajaran bersifat kolaboratif dan eksperiensial, aktivitas pro-kemasyarakatan (pembelajaran pengabdian masyarakat dan kampanye anti bully), mengikat tujuan akademik secara bersama diiringi dengan adanya tujuan karakter, menyediakan kesempatan untuk peserta didik agar dapat belajar kepemimpinan sembari mengkontribusikan suara dan pilihan mereka di sekolah, dan penekanan pada adanya pelatihan bagi para guru. Higgins-D’Alessandro menggarisbawahi bahwa dalam banyak kasus, penginstitusian program pendidikan karakter sangat penting termasuk di dalamnya lingkungan sekolah yang positif, jumlah lulusan yang meningkat, menurunnya angka ketidaksiplinan-interaksi negatif, dan meningkatnya performa akademik.³⁰

Di tingkat peserta didik dewasa, instruksi karakter secara langsung dinilai tidak berpengaruh. Oleh karena itulah direkomendasikan adanya strategi ekperiensial seperti pembelajaran kooperatif, pertemuan kelas, dan pembelajaran pengabdian sosial.

E. Penutup

Kurang bijak dan kurang relevan rasanya bila pendidikan karakter dirumuskan kembali, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai warisan baik dari pendahulunya.

²⁹ Ric Keaster, “Making Change Last: A Character Education Program”, dalam *Leading in the Decade of Challenges and Opportunities, Southern Regional Council on Educational Administration 2011 Yearbook* (Al: College of Education, 2011), h. 44.

³⁰ A. Higgins-D’Alessandro, “the Importance of Evidence-Based Evaluation in Character Education and a Brief History of Character and Moral Education in the United States”, dalam *U.S. Dept. of Education, Office of Safe and Drug-Free Schools Partnerships in Character Education Program Annual Grantee Meeting*. (2005).

Pancasila merupakan salah satu warisan terbesar dengan landasan nilai yang dapat diterima bersama. Yang diperlukan saat ini justru adalah usaha untuk merevitalisasi pendidikan butir-butir pancasila (*eka prasetia panca karsa*) dan agama secara lebih kontekstual dan efektif. Ini berarti bahwa pembelajaran pendidikan agama dan kepancasilaan mesti dipertahankan dan direvitalisasi secara menyeluruh.

Oleh karena itu, pendidikan karakter dalam hal ini, bukanlah program yang sederhana namun justru menghajatkan keterlibatan reformasi lembaga pendidikan secara komprehensif. Dengan kata lain, pendidikan karakter tidak hanya tentang subjek matter terkait pendidikan agama dan kewarganegaraan, namun menghajatkan beberapa instrumen inisiatif yang bersifat reformatif di semua lini. Oleh karena itulah, pendidikan karakter menjadi pekerjaan yang melibatkan hulu dan hilir dunia pendidikan. Dan tidak ada kata lain kecuali memulai itu semua saat ini, dan sesegera mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aroff, Abdul Rahman Md..Character building and education. In Chang Lee Hoon, Norani Mohd Salleh, Wan Hasmah Wan Mamat & Vishalatche Balakrishnan (Eds). *Asia Pacific Moral, Civic and Citizenship Education: New Vision and New Realities*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2008.
- Balakrishnan, V. *Real-Life Dilemmas in Moral Education*.Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2011.
- Berkowitz, M. & Bier, M., *What Works in Character Education: A Research-Driven Guide for Educators*. Washington, D.C.: Character Education Partnership, 2005.
- Berkowitz, M. W. & M. C. Bier. “Research-based Character Education”. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 591 (2004).
- Berkowitz, M., Battistich, V. & Bier, M. “What works in character education: What is known and what needs to be known”. L. Nucci and D. Narvaez (eds.). *Handbook of Moral and Character Education*. New York: Routledge, 2008.
- Durlak, J. et al. “The Impact of Enhancing Students Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions”. *Child Development*, 82 (2011).
- Education, U.S. Department of, *Efficacy of Schoolwide Programs to Promote Social and Character Development and Reduce Problem Behavior in Elementary School Children*. NCER: Institute of Education Sciences, 2010.
- Higgins-D’Alessandro, A., “the Importance of Evidence-Based Evaluation in Character Education and a Brief History of Character and Moral Education in the United States”. *U.S. Dept. of Education, Office of Safe and Drug-Free Schools Partnerships in Character Education Program Annual Grantee Meeting*. (2005).
- Higgnis, A., “the Just Community Approach to Moral Education:

- Evolution of the Idea and Recent Findings” dalam W. M. Kurtiner & J.L. Gerirtz (Ed). *Handbook of Moral Behaviour and Research*, vol. 3. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 1991.
- Hoon, Chang Lee, “An Appraisal on the Implementation of Moral Education for Schools in Malaysia”. *Proceedings of the 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI*, Bandung 8-10 November 2010.
- Keaster, Ric, “Making Change Last: A Chracter Education Program”. *Leading in the Decade of Challenges and Opportunities, Southern Regional Council on Educational Administration 2011 Yearbook*. Al: College of Education, 2011.
- Kupperman, J. J. “How not to educate character”. Lapsley, D.K. & Power, F.C. (Ed). *Character psychology and character education*. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2005.
- Lickona, T. *Educating for Character: How Our Schools can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam, 1991.
- Lickona, T. “Educating for Character: A Comprehensive Approach”. A Molnar (Ed). *The Constuction of Children’s Character, Ninety-sixth Yearbook of the National Soceity for the Study of Education*, Part II. Chicago: the University of Chicago, 1997.
- Lickona, T., dan M. Davidson, “Smart and Good: Integrating Performance Character and Moral Character in Schools”. *Independent School*, 66, 2 (2007).
- Ma’zumi, Jakaria. “Contribution of Madrasah to the Development of the Nation Character”. *International Journal of Scientific & Technology Research*, vol. 1, 11 (2012).
- Marshall, J. S. Caldwell & J. Foster, “Moral Education the CHARACTERplus way”. *Journal of Moral Education*, 40 (2011).
- Metcalf, Oliver & Shaver dalam Hersh, Miller & Fielding. *Models of Moral Education: An Appraisal*. New York: Longman Inc, 1980.

- Narvaez, D., *Nurturing Character in the Middle School Community. Community Voices and Character Education Project*. Minnesota: Families and Learning & University of Minnesota, 2000.
- Natsir, M. *Percakapan antara Generasi: Pesanan Perjuangan Seorang Bapak*. Malaysia: Dewan Pustaka Islam, 1975.
- Noddings, N. *Caring a Feminine Approach to Ethics and Moral Education*. Berkeley: University of California, 1994.
- Nugroho, Heru. "Pengelolaan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Islam di SD Islam al-Azhar 28 Solo Baru Sukoharjo". *Tesis S-2* tidak diterbitkan. Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (2012).
- Pala, Aynur. "The Need for Character Education". *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*, vol. 3 No. 2 (2011).
- Parisi, Duer, M., A. & Valentis, M. "Character education effectiveness". *Unpublished master's thesis*. Saint Xavier University, Chicago (2002).
- Raths, L.E. M. Harmin & S.B. Simon, *Values and Teaching*. Ohio: Charles E., Merrill Publishing Co., 1966.
- Ryan, K. & K. Bohlin, *Building Character in Schools: Practical Ways to Bring Moral Instruction to Life*. CA: Jossey-Bass, 1999.
- Salahuddin, Patricia Z. "Character Education in a Muslim School: A Case Study of a Comprehensive Muslim School's Curricula". *Disertasi doctoral tidak diterbitkan*. Florida International University Miami Florida (2011).
- Asy-Syāfi'i, Muḥammad ibn Idrīs, *al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Weissbourd, R., *the Parents We Mean to be: How Well Intentioned Adults Undermine Children's Moral and Emotional Development*. Ney York: Houghton Mifflin, 2009.